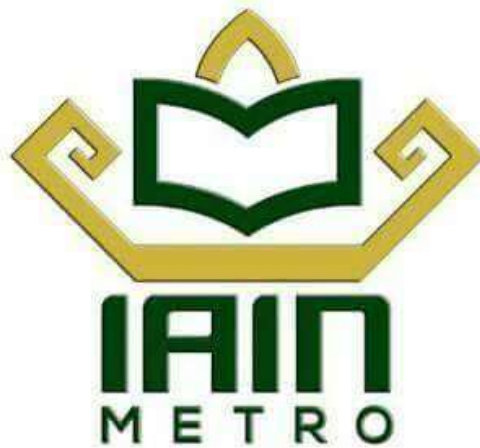


SKRIPSI

**ANALISIS PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE TERHADAP
PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA MARGO DADI,
KECAMATAN TUMIJAJAR**

Oleh :

DEVI LESTARI
NPM 2003030004



**Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/ 2024 M**

**ANALISIS PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE TERHADAP
PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA MARGO DADI,
KECAMATAN TUMIJAJAR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)**

Oleh:

**DEVILESTARI
NPM 2003030004**

Pembimbing : Thoyibatun Nisa, M.Akt

**Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/ 2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Jurnal yang disusun oleh:

Nama : Devi Lestari
NPM : 2003010003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Jurnal : **ANALISIS PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA
MARGO DADI, KECAMATAN TUMIJAJAR**

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Oktober 2024
Dosen Pembimbing

Thovibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA
MARGO DADI, KECAMATAN TUMIJAJAR
Nama : Devi Lestari
NPM : 2003010003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Oktober 2024
Dosen Pembimbing



Thovibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringsmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No:.....*B-2017/111-28-3/D/PP-00-9/11/2024*.....

Skripsi dengan Judul: "ANALISIS PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA MARGO DADI, KECAMATAN TUMIJAJAR " disusun oleh: Devi Lestari, NPM. 2003030004, Jurusan: Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at, 25 Oktober 2024

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Thoyibatun Nisa, M.Akt.

Penguji I : Esty Apridasari, M.Si.

Penguji II : Carmidah, M.Ak

Sekretaris : Witantri Dwi Swandini, M.Ak

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

ANALISIS PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA MARGO DADI, KECAMATAN TUMIJAJAR

Oleh:
DEVI LESTARI
NPM.2003030004

Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar tentu dapat mendukung kemajuan suatu desa dalam pengembangan desa atau penyelenggaraan pemerintahan desa. Krisis pengelolaan keuangan desa masih menjadi masalah yang belum teratasi secara maksimal di Indonesia. Seringkali masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa adalah efektivitas, efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer dan skunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Village Governance* di Desa Margodadi telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek partisipasi dalam perencanaan dan informasi pelaksanaan, transparansi melalui media publik, dan akuntabilitas melalui pelaporan yang terbuka. Namun keterlibatan masyarakat dalam evaluasi masih terbatas. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi dan penyempurnaan sistem informasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola dana desa.

Kata Kunci : Tata Kelola Desa yang Baik, Dana Desa, Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Devi Lestari**
NPM : 2003030004
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Oktober 2024
Yang Menyatakan,



Devi Lestari
NPM. 2003030004

MOTTO

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (Q.S. al-Hajj:41)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Slamet dan Ibunda Alm. Sautik yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilanku.
2. Kakakku tersayang, Fitriani, Alm. Adi Apriyanto dan Deva Lestari, kupersembahkan dengan rasa cinta dan terima kasih yang mendalam. Dukungan kalian yang tiada henti menjadi sumber kekuatan bagiku dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas taufik hidayah dan inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah salah satu dari bagian persyaratan menyelesaikan pendidikan jurusan akuntansi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Ibu Lella Anita, M.S,Ak M.S.Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah IAIN Metro.
4. Ibu Thoyibatun Nisa, M.Ak, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan ibu Dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama menempuh pendidikan.
6. Rekan-rekan jurusan akuntansi syariah angkatan 2020 yang telah memberikan motivasi dan kebersamaan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 23 Oktober 2024

Penulis,



Devi Lestari
NPM.200303004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Good Village Governance</i>	11
1. Pengertian <i>Good village Governance</i>	11
2. Prinsip <i>Good village Governance</i>	12
B. Pengelolaan Dana Desa.....	16
1. Proses perencanaan APB Desa.....	16
2. Pelaksanaan APB Desa	17
3. Proses Penatausahaan Keuangan Desa.....	19
4. Proses Pelaporan APB Desa	19
5. Pertanggung jawaban APB Desa	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	22

B. Sumber Data.....	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	26
E. Teknik Analisa Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian.....	30
1. Gambaran umum desa margodadi.....	30
2. Pelaksanaan Prinsip <i>good village governance</i> terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Margodadi.....	32
B. Pembahasan.....	40
1. Analisis pelaksanaan prinsip <i>good village goernnace</i> terhadap pengelolaan dana desa pada desa margodadi.	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Dana Desa Margodadi	4
Tabel 1.2 Alokasi Dana Desa Margodadi	5
Tabel 1.3 Penelitian Relevan.....	8

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. APD
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar tentu dapat mendukung kemajuan suatu desa dalam pengembangan desa atau penyelenggaraan pemerintahan desa. Krisis pengelolaan keuangan desa masih menjadi masalah yang belum teratasi secara maksimal di Indonesia. Seringkali masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa adalah efektivitas, efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa kasus korupsi yang paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2021 adalah kasus korupsi di sektor anggaran dana desa yaitu ada 154 kasus dan merugikan negara hingga Rp 233,3 miliar.¹ Banyaknya korupsi dana desa membuktikan bahwa tidak ada sistem pengelolaan dan pengendalian dana desa yang dilaksanakan secara penuh oleh pemerintah. Mengingat tingginya resiko insiden dan kerugian dalam program dana desa, maka menuntut perangkat desa, masyarakat desa, dan pemerintah sendiri untuk melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai tata kelola pemerintah desa yang baik (*good village governance*).

Desa sebagai entitas publik sangat penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Jika pengelolaan

¹ Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, and Lalola Easter, "Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021," *Indonesia Corruption Watch*, 2022, 1–40.

keuangan desa dilakukan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, tentu dana desa tersebut akan sangat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat desa sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi tinggi.²

Pengelolaan dana desa bukan hanya sebatas pembangunan biasa tetapi merupakan penunjang yang dapat mempengaruhi perkembangan dari kota/kabupaten, dengan semakin majunya teknologi, maka pengetahuan masyarakat terus berkembang dan menuntut agar adanya pertanggungjawaban dari aparatur desa terhadap dana desa yang telah diberikan.³

Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa memberi kebijakan aparat desa harus memahami tata cara dan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). *Good Village Governance* merupakan wujud tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik.⁴

Prinsip *good village governance* sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, perlu adanya penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja (*performance*) sektor publik yang penting dalam

² Dewi Kusuma Wardani and Ratih Ranika Putri Utami, "Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo," *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha* 28, no. 1 (2020): 35–50, <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.376>.

³ Putri Elit Tri and Gatot Wahyu Nugroho, "Analisa Penerapan Good Village Governance Di Desa Cikujang Dan Desa Sukamantri Kabupaten Sukabumi," *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 3 (2022): 283–92, <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1012>.

⁴ *Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa* pasal 2 ayat 1

memberikan pertanggungjawaban dari aktivitas yang dijalankan pada semua pihak yang berkepentingan.⁵

Good Village Governance memberi isyarat bahwa terwujudnya tata kelola pemerintahan desa bukan hanya menjadi tugas pemerintah desa saja, namun harus melibatkan masyarakat dan pihak swasta karena usaha pembangunan yang dilakukan merupakan hasil koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Tata kelola pemerintahan yang baik akan berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, di mana partisipasi aktif masyarakat serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dapat membangun kepercayaan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah, sehingga memperkuat pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.⁶

Menurut hasil penelitian andika sirait, menunjukkan bahwa dengan pengelolaan dan tata kelola keuangan yang baik, desa dapat dengan mudah menerapkan mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang disyaratkan dalam UU Desa No. 6 tahun 2014.⁷ tata kelolakeuangan desa yang baik salah satunya dapat dilihat melalui pengelolaan alokasi dana desa, seperti dana desa yang dikelola pada Desa Margodadi.

Desa Margodadi merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat ,Provinsi Lampung. Desa Margodadi

⁵ Dkk Mirnawati, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan" 6 (2022): 11434–40.

⁶ Windi Qotrun Nada, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Village Governance Terhadap Alokasi Pengelolaan Dana Desa," 2022.

⁷ R Meilana Sirait and Kornel Munthe, "Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi (SMA)," *Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi 1* (2022): 151–63.

tersusun atas 8 suku dengan jumlah penduduk 5863 jiwa dan 1992 KK. Perencanaan APBDesa di gunakan untuk pembangunan Desa Margodadi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Margodadi telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat, serta memberikan gambaran bagaimana pengelolaan dana desa yang akan dijalankan. Sumber pendapatan dana Desa Margodadi ada 3 seperti yang disajikan pada tabel 1.1 pendapatan dana Desa Margodadi, berikut:

Tabel 1.1 Pendapatan Dana Desa Margodadi

Uraian	Anggaran		
	2021	2022	2023
Pendapatan asli desa	14.000.000	40.883.066	6.000.000
Pendapatan transfer	1.745.188.732	1.568.457.805	1.540.880.132
Pendapatan lain-lain	650.000	650.000	650.000
Jumlah pendapatan	1.739.838.732	1.609.990.871	1.547.530.132

Sumber : laporan keuangan pemerintah tiyuh margodadi 2021/2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui Sumber pendapatan dana Desa Margodadi dibagi menjadi tiga yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain lain. Pendapatan desa pada tahun 2021 mencapai 1.739.838.732, selanjutnya menurun pada tahun 2022 yaitu 1.609.990.871, dan tahun 2023 pendapatan dana desa menurun menjadi 1.547.530.132. Dana desa tersebut dialokasikan kedalam 5 bidang yang disajikan pada tabel 1.2 alokasi dana desa berikut:

Tabel 1.2 Alokasi Dana Desa Margodadi

No	Belanja	Anggaran		
		2021	2022	2023
1	bidang peenyelenggaraan pemerintah desa	883.681.220	854.248.320	937.368.545
2	bidang pelaksanaan pembangunan desa	615.912.150	191.591.000	175.884.000
3	bidang pembinaan masyarakat	78.590.000	178.220.000	76.370.000
4	bidang pemberdayaan masyarakat	20.691.000	15.210.000	230.405.000
5	bidang penanggulangan bencana& mendesak desa.	153.815.293	458.294.538	116.456.827

Sumber: laporan keuangan pemerintah tiyuh margodadi 2021/2023

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa alokasi dana desa dibagi menjadi 5 bidang diantaranya, bidang penyelenggaraan pemerintah desa pada tahun 2021 sebesar 883.681.220, kemudian tahun 2022 yaitu 854.248.320, dan tahun 2023 mencapai 937.368.545, alokasi dana desa jika dilihat pada 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. bidang pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2021 sebesar 615.912.150, kemudian menurun pada tahun 2022 yaitu 191.591.000, selanjutnya pada tahun 2023 menurun menjadi 175.884.000, alokasi dana desa jika dilihat pada 3 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Bidang pembinaan masyarakat pada tahun 2021 sebesar 78.590.000, tahun 2022 mencapai 178.220.000, dan menurun pada tahun 2023 yaitu 76.370.000, alokasi dana desa jika dilihat pada 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2022, namun kembali turun pada tahun 2023. bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021 sebesar 20.691.000, tahun 2022 sebesar 15.210.000,

selanjutnya pada tahun 2023 sebesar 230.405.000, alokasi dana desa jika dilihat pada 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan menunjukkan lonjakan drastis pada tahun 2023. bidang penanggulangan bencana & keadaan mendesak desa pada tahun 2021 sebesar 153.815.293, tahun 2022 sebesar 458.294.538. selanjutnya pada tahun 2023 mencapai 116.456.827, alokasi dana desa jika dilihat pada tahun terakhir fluktuasi yang cukup besar terutama peningkatan anggaran pada tahun 2022.

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan bahwa terjadinya fluktuasi dan penurunan pada alokasi dana desa, dan terjadi penurunan yang signifikan pada pendapatan dana desa Sehingga membuat masyarakat kurang percaya kepada aparat desa dan menimbulkan adanya dugaan kasus korupsi.

Dugaan kasus korupsi terjadi pada tahun 2022, diduga terjadi penyelewengan anggaran pada dua pembukaan badan jalan yang tidak sesuai RAB, selain itu pada belanja bibit ikan jelabat serta hewan ternak 45 ekor kambing.⁸

Selain itu Penerapan prinsip *Good Village Governance* di Desa Margodadi juga belum optimal karena terjadi keterlambatan dalam pembuatan baliho realisasi alokasi pendapatan desa yang terjadi karena kurangnya koordinasi . Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengetahui secara transparan penggunaan dana desa yang telah dialokasikan.⁹ Penilaian terhadap penerapan *good village governance* dapat dilihat melalui empat prinsip utama yaitu

⁸ <https://cambaiqu.id/inspektorat-lirik-indikasi-korupsi-dd-tiyuh-margo-dadi-muslim-apbt-kita-periksa-khusus/>

⁹ Bapak iwan, sebagai sekretaris desa ,28-mei-2024

akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan aturan hukum. ¹⁰ Praktik *good governance* dapat menghasilkan layanan publik yang lebih berkualitas. Hasilnya, korupsi akan berkurang dan pemerintah akan lebih peduli terhadap kebutuhan masyarakat.¹¹

Berdasarkan kondisi Desa Margodadi saat ini dan sejalan dengan konsep teoritis dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Prinsip *Good Village Governance* Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin mengetahui “bagaimana prinsip *Good Village Governance* terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prinsip *Good Village Governance* Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar.

¹⁰ United Nations Development Program (UNDP) “*mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola dalam pembangunan*”, United Nations Developmen Program, 2020.

¹¹ Denis Budiarrianto and Asnita Frida Sebayang, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Pelayanan Publik Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung,” *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2021, 33–40, <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSES/article/view/49/57>.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan Dapat menjadi tambahan referensi informasi tentang *good village governance* dan dapat memberikan dukungan dalam perkembangan pemerintahan desa yang semakin baik.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan *good village governance*.
- 2) Bagi pemerintah desa, dapat dijadikan masukan mengenai *good village governance* untuk mengevaluasi pemerintah desa.
- 3) Bagi akademisi, untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat dijadikan referensi peneliti selanjutnya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian yang sudah dilakukan dan mendapatkan hasil valid sesuai dengan tujuan serta objek yang ditetapkan. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan judul analisis penerapan prinsip *good village governance* dalam alokasi dana desa sehingga dapat dijadikan bahan acuan dan masukan dalam penelitian ini.

Tabel 1.3
Penelitian Relevan

No	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisa penerapan <i>good village governance</i> di desa cikujang dan desa sukamantri	hasil penelitian ini menunjukan dana desa memiliki hubungan yang seimbang dengan	Sama-sama Meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa, Dan ingin	Peneliti saat ini menggunakan metode kualitatif, sementara peneliti sebelumnya menggunakan metode

No	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	kabupaten sukabumi (2022)	masyarakat, karena pada dasarnya dana desa yang dikucurkan pemerintah digunakan untuk pembangunan desa. ¹²	mengetahui penerapan <i>good village governance</i> didesa.	kuantitatif. Dalam penelitian saat ini indikator yang digunakan mencakup akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, sedangkan peneliti sebelumnya hanya menggunakan akuntabilitas dan transparansi tanpa memasukan partisipasi masyarakat.
2.	<i>Good governance</i> dalam pengelolaan dana desa teluk majelis kabupaten tanjung jabung timur, ahmad fajar rahmatullah(2021)	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa <i>good governance</i> dalam pengelolaan dana desa mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. ¹³	Sama sama meneliti <i>good governance</i> dalam pengelolaan dana desa	Peneliti saat ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif namun tidak fokus pada alur pengelolaan dana desa. Penelitian saat ini menyoroti partisipasi masyarakat secara lebih mendalam dengan keterlibatan dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa,

¹² Vivi Pancasari Kusumawardani and Triana Dien Alfiyah, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan)," *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 92–104, <https://doi.org/10.33084/neraca.v7i2.3567>.

¹³ Ahmad Fajar Rahmatullah and Ahmad Farhan Rahmatullah, "Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 47, no. 1 (2021): 24–33, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>.

No	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				sedangkan peneliti sebelumnya lebih fokus pada hubungan antara pengelolaan dana desa dan kesejahteraan masyarakat, namun tidak mendalami keterlibatan masyarakat di setiap tahap.
3.	Pengaruh penggunaan alokasi dana desa (ADD), akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat, afista & ichwan 2022	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi memengaruhi kesejahteraan masyarakat. ¹⁴	Sama sama membahas alokasi dana desa, akuntabilitas & transparansi.	<p>Pada penelitian sebelumnya berfokus pada hubungan langsung pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan peneliti saat ini berfokus pada evaluasi prinsip-prinsip <i>good village governance</i> yang diterapkan dalam pengelolaan dana desa.</p> <p>Peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dimana variabel variabelnya diukur menggunakan angka, sedangkan peneliti saat ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi dan nalisis dokumen.</p>

¹⁴ Afista Nur Khasanah and Ichwan Marisan, "Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)," *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 6, no. 1 (2022): 32–48, <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.189>.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Good Village Governance*

1. **Pengertian *Good village Governance***

Good village governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan desa, yang menempatkan pemerintah desa sebagai sentral dan agen perubahan karena adanya perubahan yang dikehendaki melalui pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa sehingga aparatur pemerintah desa juga dapat disebut agen pembangunan yang mendorong terjadinya proses pembangunan menuju perubahan dalam masyarakat desa.¹

Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang baik dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, pencegahan salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal* dan *politican framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. UNDP (*United Nations Development Program*) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi: partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), orientasi consensus (*consensus orientation*),

¹ Pajrul Khair Azis, “Analisis Pelaksanaan Good Village Governance Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 7.

keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effective-ness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategis (*strategic vision*).²

Good Governance merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

2. Prinsip *Good village Governance*

a. Partisipasi

Menurut slamet partisipasi diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan, kegiatan pembangunan, memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Sedangkan menurut histiraludin partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat.³

Partisipasi masyarakat adalah hak dan kewajiban masyarakat untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjadikan masyarakat memiliki sifat kreatif, aktif dan pintar dalam menghadirkan peluang pekerjaan ataupun perbaikan perekonomian

² United Nations Development Program (UNDP) "mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola dalam pembangunan", United Nations Developmen Program, 2020.

³ Agus Suyono, *Dimensi-Dimensiprima teori pembangunan* (Malang:Universitas Brawijaya Press,2019),Halaman 256.

sehingga akan membuat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.⁴

Indikator partisipasi masyarakat yaitu:

1. Adanya kelompok yang menampung partisipasi masyarakat
2. Masyarakat mampu terlibat dalam proses
3. Masyarakat menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.⁵

b. Kepastian Hukum (*Rule of law*)

Rule of law adalah penyelenggaraan negara yang diatur melalui suatu peraturan perundangundangan serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan.⁶

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa diharuskan untuk menerapkan semua aturan-aturan yang sudah disahkan oleh pemerintahan pusat guna untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan terhindar dari segala sesuatu yang bersifat merugikan negara. Oleh karena itu, regulasi atau aturan yang telah ditetapkan oleh negara harus ditetapkan dan dilaksanakan untuk menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang baik serta terhindar

⁴ Wardani and Utami, "Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo."

⁵ Rahmawati, Ansyari Mone, and Nuryanti Mustari, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Inovasi Desa Budi Daya Jamur Tiram Di Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* 2, no. April (2021): 590–604, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.

⁶ Ilyas dan Hardiyanto, "LAWNESIA THE HANDLING OF VICTIMS OF PAST GROSS HUMAN" 2, no. 1 (2023): 235–49.

dari kecurangan atau kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja.⁷

c. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan dana desa berarti prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mencari tahu dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang keuangan.⁸

Transparansi minimal dapat diukur melalui sejumlah indikator yaitu :

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi terhadap penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.⁹

d. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

⁷ hafids haryono dan muhammad farid ., “PENGARUH KEMAMPUAN PEMIMPIN KEPALA DESA TERHADAP PENERAPAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE DI DESA JEBLOGAN , KECAMATAN PARON , KABUPATEN NGAWI,” n.d., 2391–2400.

⁸ Wardani and Utami, “Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo.”

⁹ Selfianti Faisal Arsik and Herman Lawelai, “Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi,” *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2020): 1–7, <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.523>.

e. Tanggung jawab (*responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan, keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.¹⁰

Dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam permendagri no 113 tahun 2014 menyatakan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan laporan realisasi anggaran dana desa kepada bupati. Selain itu, kepala desa juga bertanggungjawab untuk mengendalikan perangkat desa dalam rangka merealisasikan anggaran APBDesa yang telah direncanakan bendahara, sekertaris desa, dan kepala saksi juga bertanggung jawab kepada desa kepala desa atas pengelolaan keuangan desa.¹¹

f. Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan

¹⁰ Rika Juwita, Asep Munajat, and Elnawati, "Mengembangkan Sikap Tanggung Jawab Melaksanakan Tugas Sekolah Melalui Metode Bercerita Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Kota Sukabumi," *Utile: Jurnal Kependidikan* V, no. 2 (2019): 144–52.

¹¹ *Peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan desa*

melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

g. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.¹² Indikator akuntabilitas yaitu:

- 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan .
- 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Adanya output dan outcome yang terukur.

h. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan publik harus mempunyai prespektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yng diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

B. Pengelolaan Dana Desa

1. Proses perencanaan APB Desa

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan

¹² Vinny Sara Gosal, Sofia E Pangemanan, and Donald K Monintja, "Jurnal Governance" 1, no. 1 (2021): 1–8.

rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa).

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut Musrembang Desa memiliki pokok pikiran yang diurai. sebut Forum musyawarah, merupakan forum diskusi dengan mekanisme pelaksanaannya dilakukan secara terbuka untuk bersepakat dengan bulat serta mufakat menentukan sesuatu pilihan yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹³

Secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa tertuang dalam beberapa rencana yaitu:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa)
- b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
- c. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)

2. Pelaksanaan APB Desa

Berikut merupakan beberapa kebijakan terkait dengan pelaksanaan APBDesa berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014, antara lain :

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

¹³ Soegiharto Saraswati and Nur Hariyanto, "Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA)," *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia* 4, no. 5 (2019): 1–28.

- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten / kota.
- c. semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
- e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa yang jumlahnya telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota
- f. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa ini tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- h. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.¹⁴

¹⁴ *Peraturan menteri dalam negeri No.113 tahun 2014, tentang kebijakan APBDesa*

3. Proses Penatausahaan Keuangan Desa

Menurut permendagri no 113 tahun 2014 bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, bendahara desa wajib bertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban bendahara disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dalam permendagri No.113 tahun 2014 menyebutkan bahwa penatausahaan, penerimaan, dan pengeluaran tersebut wajib dilaksanakan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua pengeluaran dan penerimaan yang berupa uang tunai yang ada pada bendahara desa.¹⁵

Buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat setiap kas yang berupa hasil dari pemotongan pajak dan penyetoran uang kas tersebut ke rekening negara. Buku bank digunakan untuk mencatat mutasi penyetoran rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas pada bank.

4. Proses Pelaporan APB Desa

Dalam pemendagri NO.113 Tahun 2014, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota berupa:

¹⁵ Peraturan menteri dalam negeri No.113 tahun 2014, tentang kebijakan APB Desa

- a. Laporan Semester Pertama.
- b. Laporan Semester Akhir Tahun.

Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud merupakan laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli pada periode berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.¹⁶

5. Pertanggung jawaban APB Desa

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.

Peraturan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus dilampiri oleh:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran yang bersangkutan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- c. Format Laporan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

¹⁶ *Peraturan menteri dalam negeri No.113 tahun 2014, tentang kebijakan APBDesa*

Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.¹⁷

¹⁷ bid.h.194

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari target penelitian, yang selanjutnya disebut sebagai responden dan informan melalui instrument pengumpulan data seperti kuesioner, observasi, wawancara dan lain-lain. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian yang telah dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi guna untuk menyusun laporan ilmiah.¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau field research adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di desa margodadi kecamatan tumijajar . Dimana peneliti turun langsung kelapangan untuk melihat dan mengamati Bagaimana prinsip good village governance terhadap pengelolaan dana desa pada desa margodadi kecamatan tumijajar.

¹ Suharto,Dkk,*Perekayasaan Metodologi Penelitian*,Yogyakarta,Andi,2014,h.99

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang sebenarnya, dimana peneliti bertindak sebagai instrument utama. Analisis data bersifat mengerucut dan hasil penelitiannya lebih ditekankan pada makna bukan generalisasi. Peneliti menggunakan pendekatan data dari kalimat lisan maupun tertulis dari fenomena yang berkaitan.² Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti akan memaparkan suatu peristiwa yang ada di lapangan mengenai penerapan prinsip *good village governance* terhadap pengelolaan dana desa yang nantinya akan mendapatkan kesimpulan yang menyeluruh.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³ Dalam menentukan sumber data primer, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik penambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. . Dalam penelitian ini terdapat kriteria yang akan dipilih sebagai informan yaitu, memiliki

²dkk Hardani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif*, Repository.Uinsu.Ac.Id, 2020.

³Sugiyono,308

pengetahuan tentang fenomena yang akan diteliti dan mampu memberikan keterangan secara akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun pihak-pihak yang dapat dinilai sebagai informan tersebut adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan masyarakat Desa Margodadi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder pada penelitian ini yaitu berasal dari media masa seperti *website* resmi Desa Margodadi, media cetak seperti baliho realisasi anggaran. Data sekunder juga bersumber dari peraturan pengelolaan keuangan desa yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan menteri dalam negeri No.113 tahun 2014, tentang kebijakan APBDesa, serta regulasi lain yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang perlu digunakan peneliti yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴

⁴ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta 2021)

Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan.⁵ Peneliti menanyakan informasi terkait pengelolaan dana desa pada Desa Margodadi. Adapun informan yang dapat memberikan informasi melalui teknik wawancara ini yakni perangkat desa dan masyarakat Desa Margodadi seperti : Feri Saputra selaku kepala Tiyuh, Iwan Selaku Sekretaris, Yogi selaku bendahara dan masyarakat

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa tahapan wawancara yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap persiapan peneliti menentukan tujuan atau topik serta informasi yang akan digali. Daftar pertanyaan juga disiapkan oleh peneliti sebagai upaya terstrukturnya proses wawancara tersebut. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, peneliti menjelaskan secara singkat tujuan wawancara tersebut lalu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai informasi yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa foto, catatan, buku teks, jurnal dan lain sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen lembaga/instansi seperti bukti realisasi anggaran desa, foto kegiatan, dan hasil wawancara dari beberapa informan guna memperoleh data mengenai analisis prinsip *good village governance* terhadap pengelolaan dana desa.

⁵Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta 2021)

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan teknik penjamin keabsahan data triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam teknik triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu ada triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Peneliti memilih teknik triangulasi sumber untuk digunakan di penelitian. Alasannya dikarenakan triangulasi sumber ini dinilai cocok bagi penelitian peneliti. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁶

Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengecek data yang didapat dengan menggunakan teknik seperti, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisa data triangulasi sumber untuk menanyakan beberapa hal dari berbagai sumber yang berbeda diantaranya kepala tiyuh, sekretaris desa, kaur keuangan dan masyarakat margo dadi. Kemudian di analisis oleh peneliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sudah sesuai dengan sumber data mengenai prinsip *good village governance* terhadap pengelolaan dana desa.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data yaitu data yang sudah diolah sehingga memperoleh hasil yang mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil dari olahan data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data,

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.*, 184.

meringkas data sehingga membentuk suatu kesimpulan. Analisis data berarti menyederhanakan proses menjadi format yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, dan data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis terus menerus. Ini memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi tersebut benar dan jelas.⁷

Dalam penelitian ini peneliti membahas secara khusus prinsip *good village governance* terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan permasalahan yang ada kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan tentang bagaimana pelaksanaan prinsip *good village governance* terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Margodadi.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk deskripsi. Miles & Huberman, berpendapat bahwa analisis data terdiri dari tiga yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan

⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 211.

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁸ Reduksi dalam penelitian ini memfokuskan pada prinsip *good village governance* terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Margodadi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchar* dan sejenis. Penyajian data dipakai untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus yang didapatkan dalam penelitian dan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan, dan data ditampilkan dalam bentuk paparan atau uraian yang mudah dipahami yang berdasarkan indikator terkait prinsip *good village governance* terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Margodadi.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara.⁹ Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat.

⁸ Surya Bintari, *Metodologi Penelitian Ekonomi Manajemen, Konferensi Internasional Pembangunan Islam* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2015), 25.

⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 133.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif adalah berfikir induktif. Cara berfikir induktif yaitu suatu cara yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁰ Tujuannya untuk menyederhankan yang telah terkumpul dan menyajikan dalam susunan yang baik sehingga lebih mudah di pahami.

Dalam penelitian ini peneliti membuat penarikan kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif yakni dengan cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum berdasarkan data, peristiwa, dan realita yang logis di lapangan.

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 213.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Gambaran umum desa margodadi

a. Sejarah desa margodadi

Desa margodadi adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan tumijajar kabupaten tulang bawang barat provinsi lampung. Sebelum berdiri sebagai desa sendiri, desa margodadi merupakan dari desa margo mulyo yang merupakan wilayah kecamatan tumijajar kabupaten tulang bawang barat provinsi lampung. Pada tahun 1998 barulah desa margodadi melakukan pemisahan/pemekaran dan membentuk sebuah pemerintahan desa sendiri dan disahkan pada tahun 2000.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa desa margodadi mulai membentuk pemerintahan desa sendiri sekitar tahun 1998. Adapun sampai saat ini desa margodadi telah dipimpin oleh kepala desa antara lain :

- a. Bapak agus tarmizi tahun jabatan 1998 sd 2000
- b. Bapak sardiman tahun jabatan 2000 sd 2021
- c. Bapak feri saputra tahun jabatan 2021 sd 2026

b. Letak geografis desa margodadi

Letak geografis desa margodadi terletak di $-4^{\circ}34'22,314''$ s $105^{\circ}6'32,016''$ E dan berada di 359° lintang utara. Sedangkan luas desa margodadi adalah 1.092 km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa margo mulyo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa sumberejo
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa dayamurni
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa gunung menanti

Desa margodadi terletak di kecamatan tumijajar kabupaten tulang bawang barat provinsi lampung dengan jarak 7km dengan kantor kecamatan serta dapat ditempuh dengan 10 menit perjalanan.

c. Letak demografi desa margodadi

Desa margodadi hanya terdiri dari 8 (delapan) suku/dusun dan 20(dua puluh) RT (rukun tetangga), dengan jumlah penduduk 5.345 jiwa atau 1.649 KK, dengan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun sebanyak 867 jiwa dan penduduk yang berusia 15-65 tahun sebanyak 4,254jiwa.

d. Potensi unggulan desa

Desa Magodadi merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lokasinya di Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian bercocok tanam/petani, diantaranya sebagai berikut:

- a) Petani Singkong/Ubi Kayu
- b) Petani Padi
- c) Petani Sayur-sayuran
- d) Kebun Karet

e) Kebun Sawit

Sebenarnya tidak hanya pertanian saja yang menjadi mata pencaharian penduduk desa Margodadi, tetapi juga peternakan seperti ternak sapi, ternak kambing, ternak ayam. Dari berbagai jenis pertanian dan peternakan tersebut di atas yang dimiliki penduduk desa Margodadi yang menjadi potensi unggulan adalah tanaman singkong (ubi kayu) karena sepanjang perjalanan dari suku 1 sampai dengan suku 8 sebagian besar bertanam singkong (ubi kayu).

2. Pelaksanaan Prinsip *good village governance* terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Margodadi

Adapun penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Margodadi sebagai berikut :

a. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan faktor terpenting dalam mempengaruhi keberhasilan program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, namun partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam mengidentifikasi setiap permasalahan sehingga dari partisipasi tersebut akan memunculkan program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana desa, keterlibatan masyarakat dalam setiap perencanaan program pembangunan perlu dilakukan.

Partisipasi masyarakat sebagai wujud penerapan prinsip-prinsip *good village governance* merupakan hal yang penting. Berdasarkan hasil penelitian Tingkat partisipasi masarakat Margodadi dalam tahap perencanaan hingga evaluasi sudah melibatkan masyarakat desa. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil sebagai berikut:

Pertanyaan partisipasi	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan atau keputusan terkait pengelolaan dana desa?	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Apakah masyarakat Desa Margo Dadi diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atau masukan dalam penggunaan dana desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Apakah ada kendala yang dihadapi masyarakat dalam berpartisipasi di pengelolaan dana desa?						√		√		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan penggunaan dana desa serta memberikan ruang untuk masukan masyarakat, yang menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik. Meskipun demikian, adanya kendala partisipasi pada sebagian masyarakat kecil menunjukkan bahwa masih terdapat peluang perbaikan, misalnya melalui peningkatan akses atau pelaksanaan musyawarah informasi. Dengan diperbaikinya kendala-kendala ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat merasa bahwa informasi mengenai penggunaan dana desa disampaikan secara terbuka, tersedia akses informasi yang memadai, dan rincian anggaran serta realisasi dana desa dapat diakses. Transparansi yang baik ini menunjukkan upaya pemerintah desa untuk membangun kepercayaan publik serta mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Kombinasi keterbukaan ini memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaan dana lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan bersama.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa berarti upaya pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan. Dalam pengelolaan keuangan desa prinsip akuntabilitas harus diterapkan untuk mencapai good village governance.

Dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, setiap pelaksanaan tugas harus mengikuti aturan dan tata cara yang berlaku, mulai dari tahap pencairan dana hingga penyusunan laporan hasil kegiatan. Tim pelaksana kegiatan memiliki peran utama dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan, sangat penting karena melibatkan dana pemerintah yang bersumber dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan aparatur

Desa Margodadi peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

Pertanyaan akuntabilitas	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Apakah pemerintah desa memberikan laporan terkait penggunaan dana desa secara berkala	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
apakah pihak desa memiliki sistem pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan dana desa?	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Apakah masyarakat melakukan protes jika terdapat ketidaksesuaian dalam pelaporan penggunaan dana desa?	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berhasil membangun sistem transparansi dan akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan dana desa, terbukti melalui pelaporan berkala dan sistem pertanggungjawaban yang baik. Di sisi lain, masyarakat juga menunjukkan partisipasi aktif dalam pengawasan dana desa, di mana mereka siap melakukan protes jika terjadi ketidaksesuaian dalam laporan. Sinergi antara transparansi pemerintah desa dan pengawasan masyarakat ini menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih efektif, terpercaya, dan berorientasi pada kebutuhan bersama.

d. Responsibilitas

Dalam setiap organisasi termasuk juga pemerintah desa pastilah setiap anggotanya dituntut harus memiliki komitmen untuk melaksanakan

tanggungjawabnya dengan baik. Selain itu dituntut untuk melaksanakan tanggungjawab dengan baik mereka juga dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai wewenang yang diembannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan aparatur Desa Margodadi peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

Pertanyaan responsibilitas	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Apakah pihak desa merespons dengan cepat jika ada masukan atau keluhan dari masyarakat terkait penggunaan dana desa?	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Apakah pemerintah desa menanggapi kebutuhan dan prioritas pembangunan yang diajukan masyarakat?	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tingkat tanggung jawab dan keterbukaan yang tinggi terhadap masyarakat. Seluruh responden merasa bahwa pihak desa merespons dengan cepat setiap masukan atau keluhan terkait penggunaan dana desa, yang mencerminkan adanya komunikasi yang baik serta perhatian pemerintah desa terhadap kebutuhan warganya. Selain itu, seluruh responden juga merasa bahwa pemerintah desa menanggapi kebutuhan dan prioritas pembangunan yang disampaikan masyarakat, menunjukkan adanya keselarasan antara program pembangunan desa dan aspirasi warga. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa mampu membangun hubungan yang positif dengan masyarakat, di

mana kebijakan pembangunan berjalan sesuai harapan dan kebutuhan bersama.

e. Efektifitas dan efisiensi

Efektifitas yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai). Dalam hal ini tujuan pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan aparatur Desa Margodadi peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

Pertanyaan efektifitas & efisiensi	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
apakah dana desa yang dialokasikan sudah dimanfaatkan dengan optimal untuk kebutuhan desa?	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Apakah penggunaan dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang diinginkan masyarakat?	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Apakah ada yang perlu ditingkatkan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa?	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh responden menilai dana desa telah dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan desa dan bahwa penggunaannya sudah sesuai dengan kebutuhan serta prioritas masyarakat. Pengelolaan dana desa saat ini sudah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Namun, meskipun pemanfaatannya dinilai optimal dan

sesuai kebutuhan, semua responden juga menyatakan bahwa masih ada aspek yang perlu ditingkatkan guna mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pengelolaan dana desa namun tetap memiliki aspirasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan agar lebih efisien dan tepat sasaran.

f. Kepastian hukum

Pengelolaan keuangan desa menurut pemendagri nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus dilakukan berdasarkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan aparatur Desa Margodadi peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

Pertanyaan kepastian hukum	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Apakah Anda mengetahui adanya aturan yang mengatur pengelolaan dana desa?	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
apakah pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman mengenai aturan pengelolaan dana desa, meskipun

masih ada yang belum sepenuhnya mengetahui atau memahami aturan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan sosialisasi regulasi dana desa guna mencapai pemahaman yang lebih merata. Selain itu, seluruh responden merasa bahwa pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mencerminkan kepercayaan tinggi masyarakat terhadap tata kelola dana desa di wilayah mereka yang dinilai telah memenuhi.

B. Pembahasan

1. Analisis pelaksanaan prinsip *good village goernnace* terhadap pengelolaan dana desa pada desa margodadi.

Pemberian dana desa dari pemerintah pusat kepada desa-desa di seluruh Indonesia sebagai langkah pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan suatu tata kelola dana desa yang baik. Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan partisipasi, transparansi, akuntabel dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prinsip *good village governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.¹

Penerapan prinsip-prinsip *good viilage governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Margodadi menunjukkan upaya pemerintah

¹ Badrus Zaman and Diah Nurdiwaty, "Penerapan Prinsip Good Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)," *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi Peta 5*, no. 1 (2020): 65–84.

desa untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, penerapan beberapa prinsip *good governance* dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Partisipasi

Tingkat partisipasi masyarakat Desa Margodadi dalam pengelolaan dana desa cukup tinggi, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan partisipasi sebagai tenaga kerja dalam proyek-proyek pembangunan desa. Namun, keterlibatan masyarakat dalam tahap evaluasi masih terbatas, diwakili oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) sebagai perwakilan masyarakat. Partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menghargai masukan dari warga dan menjadikannya dasar untuk menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan prinsip yang diterapkan dengan baik oleh pemerintah Desa Margodadi. Pemerintah desa secara terbuka menyampaikan informasi terkait anggaran dan realisasi dana desa melalui berbagai media, seperti banner, papan informasi di lokasi pembangunan, dan *website* resmi desa. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berkomitmen memberikan akses informasi yang jelas dan jujur kepada masyarakat,

sehingga meningkatkan kepercayaan warga terhadap pengelolaan dana desa.

c. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas diterapkan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Pemerintah Desa Margodadi juga mematuhi aturan yang berlaku mulai dari pencairan hingga pelaporan, serta menyediakan bukti-bukti transaksi untuk setiap kegiatan pembangunan. Penggunaan papan informasi pada lokasi pembangunan dan pelaporan melalui media terbuka memastikan bahwa pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

d. Responsibilitas

Pemerintah Desa Margodadi menunjukkan responsibilitas dalam merespons masukan dan keluhan masyarakat. Melalui komunikasi terbuka dan rapat aparatur desa, pemerintah desa menanggapi dengan cepat setiap masukan terkait penggunaan dana desa. Respons yang cepat ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya memahami tanggung jawab mereka tetapi juga menjaga transparansi dan menghindari timbulnya dugaan negatif dari masyarakat.

e. Efektivitas dan Efisiensi

Berdasarkan wawancara, penggunaan dana desa di Desa Margodadi dinilai efektif dan efisien karena tepat sasaran dan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan yang mendukung akses petani ke ladang mereka. Pemanfaatan dana yang optimal sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu mencapai tujuan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

f. Kepastian Hukum

Pengelolaan keuangan desa di Desa Margodadi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Keselarasan dengan ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memahami pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan dana desa dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini menciptakan kepercayaan masyarakat bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan cara yang benar dan transparan.

Keberhasilan pengelolaan dana desa berasal dari peran aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) menjadi langkah penting untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan dana desa, karena SDM yang berkualitas akan berdampak positif terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola dana tersebut. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa

pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara profesional agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan. Oleh karena itu, peningkatan SDM perlu dilakukan agar pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Margodadi telah berjalan dengan baik, meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, efektivitas, efisiensi, serta kepastian hukum. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, menunjukkan bahwa pemerintah desa menghargai masukan warga dan menjadikannya dasar dalam menyusun program yang sesuai kebutuhan. Transparansi dijalankan melalui penyampaian informasi anggaran dan realisasi dana secara terbuka, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan pelaporan berkala yang dapat diakses masyarakat dan pelibatan warga dalam pengawasan penggunaan dana.

Keberhasilan pengelolaan dana desa ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) menjadi penting agar pengelolaan dana desa dapat terus meningkat kualitasnya dan dijalankan secara profesional, sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini diharapkan dapat mencegah penyimpangan, memaksimalkan pemanfaatan dana, dan memperkuat pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di Desa Margodadi.

B. Saran

Pengelolaan dana desa harus didasarkan pada penerapan prinsip *good village governance*. Dari prinsip partisipasi keterlibatan masyarakat tidak hanya sampai tahap pelaksanaan saja tetapi sampai tahap evaluasi karena adanya evaluasi hasil pembangunan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Dalam prinsip transparansi sudah berjalan baik dengan memasang baliho dan adanya media website, tetapi untuk media website perlu di update agar masyarakat dapat mengetahui program kegiatan desa yang baru. Selanjutnya akuntabilitas harus ditingkatkan agar bisa memperkuat sistem pengawasan serta meminimalkan risiko ketidakjelasan dalam penggunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Carmidah, C., & Sukirno, S. (2021). *Corporate Governance dan kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia. Akuisisi: Jurnal Akuntansi.*
- Fahlevi, M. R., & Nisa, T. (2023). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Aman Syari'ah di Sekampung). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 112-123.
- Utama, F. R., & Anita, L. (2024). Pengaruh perbedaan gender pada hubungan pengalaman kerja audit dengan kualitas audit. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 21(1), 71-82.
- Anandya, Diky, Kurnia Ramadhana, and Lalola Easter. "Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021." *Indonesia Corruption Watch*, 2022, 1-40.
- Arsik, Selfianti Faisal, and Herman Lawelai. "Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi." *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2020): 1-7.
- Budiarrianto, Denis, and Asnita Frida Sebayang. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung." *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2021, 33-40.
- Gosal, Vinny Sara, Sofia E Pangemanan, and Donald K Monintja. "Jurnal Governance" 1, no. 1 (2021): 1-8.
- Hardani, dkk. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif. Repository.Uinsu.Ac.Id*, 2020.
- Ilmu, S, Administrasi Negara, Fakultas Ilmu, and Universitas Negeri Surabaya. "PENGARUH KEMAMPUAN PEMIMPIN KEPALA DESA TERHADAP PENERAPAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE DI DESA JEBLOGAN , KECAMATAN PARON , KABUPATEN NGAWI Hafids Haryonno Muhammad Farid Ma ' Ruf Abstrak," n.d., 2391-2400.
- Juwita, Rika, Asep Munajat, and Elnawati. "Mengembangkan Sikap Tanggung Jawab Melaksanakan Tugas Sekolah Melalui Metode Bercerita Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Kota Sukabumi." *Utile: Jurnal Kependidikan* V, no. 2 (2019): 144-52.

- Khasanah, Afista Nur, and Ichwan Marisan. "Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)." *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 6, no. 1 (2022): 32–48.
- Mirawati, Dkk. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan" 6 (2022): 11434–40.
- Negara, Konsep, and Hukum Dan. "LAWNESIA THE HANDLING OF VICTIMS OF PAST GROSS HUMAN" 2, no. 1 (2023): 235–49.
- Pancasari Kusumawardani, Vivi, and Triana Dien Alfiyah. "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan)." *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 92–104.
- Qotrun Nada, Windi. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Village Governance Terhadap Alokasi Pengelolaan Dana Desa," 2022.
- Rahmatullah, Ahmad Fajar, and Ahmad Farhan Rahmatullah. "Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 47, no. 1 (2021): 24–33.
- Rahmawati, Ansyari Mone, and Nuryanti Mustari. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Inovasi Desa Budi Daya Jamur Tiram Di Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros." *Kajian*
- Saraswati, Soegiharto, and Nur Hariyanto. "Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA)." *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia* 4, no. 5 (2019): 1–28.
- Sirait, R Meilana, and Kornel Munthe. "Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi (SMA)." *Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi* 1 (2022): 151–63.
- Tri, Putri Elit, and Gatot Wahyu Nugroho. "Analisa Penerapan Good Village Governance Di Desa Cikujang Dan Desa Sukamantri Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 3 (2022): 283–92.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Ratih Ranika Putri Utami. "Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo." *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha* 28, no. 1 (2020): 35–50.
- Zaman, Badrus, and Diah Nurdiwaty. "Penerapan Prinsip Good Dalam

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri).” *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi Peta 5*, no. 1 (2020): 65–84.

(ICW), Indonesia Corruption Watch. “Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan Di Tengah Kepungan Korupsi.” *Indonesia Corruption Watch*, 2021.

“APBDes (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) _ Definisi – DESA KLAMPOK,” n.d.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3277/In.28.3/D.1/TL.00/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Metro, 09 November 2023

Kepada Yth,
Thoyibatun Nisa (Dosen Pembimbing Skripsi)
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Devi Lestari
NPM : 2003030004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Prinsip Good Village Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Margodadi, Kec. Tumijajar)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI

Putri Swastika

OUTLINE
ANALISIS PRINSIP *GOOD VILLAGE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA MARGO DADI , KECAMATAN
TUMIJAJAR

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Pertanyaan Penelitian**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
- D. Penelitian Relevan**

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Good Village Governance**
 - 1. Pengertian *Good Governance***
 - 2. Prinsip *Good Governance***
- B. Pengelolaan Keuangan Desa**
 - 1. Proses perencanaan APB Desa**
 - 2. Pelaksanaan APB Desa**
 - 3. Proses Penatausahaan Keuangan Desa**
 - 4. Proses Pelaporan APB Desa**
 - 5. Pertanggung jawaban APB Desa**

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian**
 - 1. Jenis Penelitian**
 - 2. Sifat Penelitian**
- B. Sumber Data**
 - 1. Data Primer**
 - 2. Data Sekunder**
- C. Teknik Pengumpulan Data**
 - 1. Wawancara**
 - 2. Dokumentasi**
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**
- E. Teknik Analisa Data**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian**
 - 1. Gambaran umum desa Margodadi**

2. Pelaksanaan PRinsip *good village governance* terhadap pengelolaan dana desa pada desa Margodadi
 3. Alur pengelolaan dana desa di desa Margodadi KEcamatan Tumijajar
- B. Pembahasan
1. Analisis pelaksanaan prinsip *good village goernnance* terhadap pengelolaan dana desa pada desa Margodadi
 2. Analisis alur pengelolaan dana desa di desa Margodadi

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Thovibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

Metro, Juli 2024

Mahasiswa Ybs,



Devi Lestari
NPM. 2003030004

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
ANALISIS PRINSIP *GOOD VILLAGE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA MARGO DADI , KECAMATAN
TUMIJAJAR**

1. Sejauh mana Anda merasa dilibatkan dalam perencanaan atau keputusan terkait pengelolaan dana desa?
2. Apakah masyarakat Desa Margo Dadi diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atau masukan dalam penggunaan dana desa? Jika ya, bagaimana prosesnya?
3. Menurut Anda, apa kendala yang dihadapi masyarakat dalam berpartisipasi di pengelolaan dana desa?
4. Apakah Anda merasa bahwa penggunaan dana desa dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat?
5. Bagaimana akses masyarakat terhadap informasi terkait penggunaan dana desa? Apakah informasi tersebut mudah didapatkan?
6. Menurut Anda, apakah pemerintah desa cukup terbuka mengenai rincian anggaran dan laporan realisasi penggunaan dana desa?
7. Apakah pemerintah desa memberikan laporan terkait penggunaan dana desa secara berkala? Jika ya, bagaimana cara laporan tersebut disampaikan?
8. Menurut Anda, apakah pihak desa memiliki sistem pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan dana desa?
9. Bagaimana sikap masyarakat jika terdapat ketidaksesuaian dalam pelaporan penggunaan dana desa?
10. Apakah pihak desa merespons dengan cepat jika ada masukan atau keluhan dari masyarakat terkait penggunaan dana desa?
11. Bagaimana pemerintah desa menanggapi kebutuhan dan prioritas pembangunan yang diajukan masyarakat?
12. Menurut Anda, apakah dana desa yang dialokasikan sudah dimanfaatkan dengan optimal untuk kebutuhan desa?
13. Apakah penggunaan dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang diinginkan masyarakat?
14. Menurut Anda, apa yang dapat ditingkatkan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa?
15. Apakah Anda mengetahui adanya aturan yang mengatur pengelolaan dana desa? Jika ya, bagaimana pemerintah desa mensosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat?
16. Menurut Anda, apakah pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Metro, juli 2024

Mahasiswa Ybs,

Dosen Pembimbing



Thoyibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

Devi Lestari
NPM. 2003030004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2293/In.28/D.1/TL.00/08/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Margodadi
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2294/In.28/D.1/TL.01/08/2024, tanggal 16 Agustus 2024 atas nama saudara:

Nama : **DEVI LESTARI**
NPM : 2003030004
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Margodadi bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Margodadi, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA MARGODADI KECAMATAN TUMIJAJAR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Agustus 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



NIP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2294/In.28/D.1/TL.01/08/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DEVI LESTARI**
NPM : 2003030004
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Margodadi, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA MARGODADI KECAMATAN TUMIJAJAR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Mengetahui,
Pejabat Setempat
FERI SAPUTRA
(Kepala Tiyuh / KADTS)

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



NIP



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN TUMIJAJAR
TIYUH MARGODADI

No. Reg. 18.12.02.2009. email. tiyuhmargodadi99@gmail.com

Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, RT. 10/RW. 04, Margodadi, Kec. Tumijajar, Tubaba, Lampung, Kode Pos 34692

No : 140/630/MD-TJ//VIII/2024
Hal : Surat Balasan Permohonan Penelitian

Margodadi, 27 Agustus 2024

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
di
Tempat,

Terkait dengan surat tugas penelitian Nomor : B-2294/In.28/D.1/TL.01/08/2024 yang diberikan oleh **DEVI LESTARI** Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro, untuk melaksanakan penelitian skripsi tingkat perguruan tinggi dan atau tugas akhir di Desa/Tiyuh Margodadi Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan ini kami Kepala Tiyuh Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan izin kepada mahasiswi yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang diberikan diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Kepala Tiyuh Margodadi



FERY SAPUTRA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-864/In.28/S/U.1/OT.01/09/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DEVI LESTARI
NPM : 2003030004
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2003030004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 02 September 2024
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Ms.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Devi Lestari
NPM : 2003030004
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Prinsip Good Village Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Margo Dadi, Kecamatan Tumijajar** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 23%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Oktober 2024
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Lella Anita, M.S.Ak
NIP.198811282019032008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Lestari

Jurusan/Fakultas : AKS/ FEBI

NPM : 2003030004

Semester / T A : VII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27 Dec 2023	<ul style="list-style-type: none">• Prasurvey kelokasi untuk memastikan permasalahan yg ada• kumpulkan data lapangan<ul style="list-style-type: none">↳ msy↳ pengelola↳ Kades• Indikator pengukur GVG hrs ada	

Dosen Pembimbing

Thovibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

Mahasiswa Ybs,

Devi Lestari
NPM. 2003030004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Lestari

Jurusan/Fakultas : AKS/ FEBI

NPM : 2003030004

Semester / T A : VII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28 feb 2024	<ul style="list-style-type: none">• Revisi sistematika penulisan & teknisnya• LBM diperbaiki<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan dana desa seberapa harus disajikan, munculkan persoalan/masalah survey kelokasi temukan fakta² yg ada sandingkan dg teori untuk memunculkan gap selanjutnya perluat dengan data.- Sandingkan dg penelitian terdahulu untuk memperluas arah penelitian- Indikator good village governance diteliti juga untuk memperluas- Penelitian relevan direvisi munculkan perbedaan yg khas untuk memperlihatkan kebaruan serta sajikan hasil penelitian sebelumnya.• BAB II : teori² yg disajikan teori yg digunakan peneliti untuk meneliti, indikator tiap variabel hrs ada• Bab III : Metode yg dilakukan peneliti harus jelas• Daftar pustaka sesuaikan buku panduan• kutipan² harus diberi footnote	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Thoyibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

Devi Lestari
NPM. 2003030004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Lestari

Jurusan/Fakultas : AKS/ FEBI

NPM : 2003030004

Semester / T A : VII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25 maret 2024	<ul style="list-style-type: none">• Revisi LBM<ul style="list-style-type: none">- munculkan data penelitian & hasil wawancara- sandingkan fakta yg ada dg teori sehingga memunculkan GAP / kesenjangan- kaitkan dg penelitian terdahulu- Suggung teori di LBM• Teori yg digunakan yg sesuai dg penelitian, jk ada aturannya sngkan diteori• Metode sandingkan teori dg yg dilakukan oleh peneliti• Referensi masih minim gunakan buku 10 th terakhir jurnal 5 th terakhir	

Dosen Pembimbing

Thoyibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

Mahasiswa Ybs,

Devi Lestari
NPM. 2003030004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Lestari

Jurusan/Fakultas : AKS/ FEBI

NPM : 2003030004

Semester / T A : VII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1-April-2024	<ul style="list-style-type: none">• Revisi CBM<ul style="list-style-type: none">- Cekkan dengan Fakta yg ada & teori- Perbaiki Sesuaikan dgn Statement arah Penelitian Serta teori tentang GVB• Penelitian relevan<ul style="list-style-type: none">- Cari teori beserta Sumber & gunakan referensi terbaru• Pada teknik analisa data harus jelas teknik yang digunakan• Tambahkan Referensi	

Dosen Pembimbing

Thoyibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

Mahasiswa Ybs,

Devi Lestari
NPM. 2003030004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Lestari

Jurusan/Fakultas : AKS/ FEBI

NPM : 2003030004

Semester / T A : VII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24 - 04 - 2024	<p>• LBM perbaiki</p> <p>↳ 1 harus ada data yg dijadikan dasar penelitian</p> <p>↳ data tsb sandingkan dg aturan krm ini kaitany dg alokasi dana desa ada tidak gap / ketidak sesuaian → kalau ada artinya ada persoalan kembangkan serta kaitkan dg teori & penelitian terdahulu.</p> <ul style="list-style-type: none">• pertanyaan penelitian perbaiki• Revisi penelitian relevan	

Dosen Pembimbing

Thovibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

Mahasiswa Ybs,

Devi Lestari
NPM. 2003030004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15a Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FOLMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Lestari
NPM : 2003030004

Jurusan : AKS/FEBI
Semester/TA : VII

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	Febu. 8 Mei 2024	ACC. untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing

Thoyibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

Mahasiswa Ybs,

Devi Lestari
NPM.2003030004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Devi Lestari**
NPM : 2003030004

Fakultas / Jurusan: FEBI / Akuntansi Syariah
Semester / TA : IX / 2024-2025

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12 Agustus 2024	Acc APD & outline layout Bab 4 & 5	

Dosen Pembimbing

Thoyibatun Nisa, M.Akt
NIP. 19900901 201903 2 009

Mahasiswa Ybs.

Devi Lestari
NPM. 2003030004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; E-mail: syahiah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Devi Lestari**
NPM : 2003030004

Fakultas / Jurusan: **FEBI / Akuntansi Syariah**
Semester / TA : **IX / 2024-2025**

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19 sep 2024	<p>Bab 1</p> <ul style="list-style-type: none">• Revisi LBM munculkan indikator Good village governance• Munculkan hasil penelitian terdahulu untuk memunculkan GAP / fenomena / masalah• Penelitian relevan gunakan yg sesuai dg penelitian <p>BAB 2</p> <ul style="list-style-type: none">• Teori diperkaya• Cantumkan teori yg digunakan dalam melakukan penelitian misal untuk teori GVB diperkaya sd indikatornya harus jelas <p>BAB 3</p> <ul style="list-style-type: none">• Sumber data gunakan yg sesuai dg sumber yg ditunjukkan jika data tsb diambil tdk berdasarkan kriteria tdk perlu menggunakan purposive sampling• jk menggunakan self assesment dimunculkan dimetode apa saja yg akan digali bs berupa tabel / point yg digunakan• jk menggunakan keabsahan data dg triangulasi ya hrs tergambar <p>BAB 4</p> <ul style="list-style-type: none">• Hasil & pembahasan dibuat terpisah sehingga tidak campur aduk <p>systematika penulisan perbaikan</p>	

Dosen Pembimbing

Thoyibatun Nisa, M.Akt
NIP. 19900901 201903 2 009

Mahasiswa Ybs.

Devi Lestari
NPM. 2003030004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Devi Lestari**
NPM : 2003030004

Fakultas / Jurusan: **FEBI / Akuntansi Syariah**
Semester / TA : **IX / 2024-2025**

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9. Oct 2024	<ul style="list-style-type: none">• Revisi LBM ← kaitkan dg penelitian terdahulu munculkan fakta yg terjadi• Revisi BAB III<ul style="list-style-type: none">• Metode tidak hanya teoritis tetapi munculkan metode yg digunakan peneliti• Revisi BAB IV<ul style="list-style-type: none">• Hasil harus sesuai dengan data & fakta• Beri analisis	

Dosen Pembimbing

Thoyibatun Nisa, M.Akt
NIP. 19900901 201903 2 009



Mahasiswa Ybs.

Devi Lestari
NPM. 2003030004

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Devi Lestari**
NPM : 2003030004

Fakultas / Jurusan: FEBI / Akuntansi Syariah
Semester / TA : IX / 2024-2025

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 Oct 2024	<ul style="list-style-type: none"> •> Revisi LBM kaitkan dg hasil penelitian terdahulu •> Revisi penelitian relevan •> Seharusnya menjadi tabel ya sagkan berupa tabel •> Bab B jika menggunakan self assesment ya paparkan dan jelaskan •> Bab 4 setelah hasil pada bagian pembahasan kaitkan dg self assesment kemudian sagkan analisis peneliti 	
	27 okt 2024	<ul style="list-style-type: none"> •> Revisi bab 4 •> bag hasil kaitkan dg self assesment •> bag pembahasan sagkan analisis peneliti •> sistematika penulisan perbaiki •> tabel beri kepala tabel dan sumber •> Revisi bag penelitian relevan 	

Dosen Pembimbing



Thoyibatun Nisa, M.Akt
NIP. 19900901 201903 2 009

Mahasiswa Ybs.



Devi Lestari
NPM. 2003030004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Devi Lestari**
NPM : 2003030004

Fakultas / Jurusan: FEBI / Akuntansi Syariah
Semester / TA : IX / 2024-2025

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/2024 /10	Acc untuk dimunqosahkan	

Dosen Pembimbing

Thoyibatun Nisa, M.Akt
NIP. 19900901 201903 2 009

Mahasiswa Ybs.

Devi Lestari
NPM. 2003030004

Foto lampiran



Foto 1 kegiatan musyawarah tiyuh



Foto 2 penyaluran BLT



Foto 3. Pembangunan onderlath

RIWAYAT HIDUP



Devi Lestari dilahirkan di Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 04 Juni 2002, anak ketiga dari pasangan Bapak Selamat dan Alm. Ibu Sautik.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Tumijajar, selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Tumijajar, selesai pada tahun 2017. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas peneliti tempuh di SMA Negeri 2 Tumijajar, selesai pada tahun 2020. Kemudian, peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2020/2021.